



EDISI RABU 28 JANUARI 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

02

GOVERNMENTTODAY
Penipuan Digital Capai Triliunan,
Registrasi SIM Card Biometrik Diwajibkan

04

NUSANTARA
Menguat Kabar PHK 2.500 Buruh
Pabrik Kertas di Jatim

10

LISTSTYLE
Rahasia Makeup Bibir Tampak Penuh
Tanpa Bantuan Filter

Dugaan Korupsi Minyak Mentah Pertamina

AHOK TANTANG USUT ERICK DAN JOKOWI

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok secara terbuka menantang jaksa penuntut umum untuk memeriksa mantan Menteri BUMN Erick Thohir hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023. Hal itu diungkapkan saat memberikan kesaksian di sidang Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026). Persidangan ini menghadirkan sembilan terdakwa, meliputi Riva Siahaan, Sani Dinar Saifuddin, Yoki Firnandi, Agus Purwono, Maya Kusmaya, Edward Corne, Muhammad Kerry Adrianto Riza, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadhan Joedo. Di sisi lain, Ahok mengungkapkan bahwa dirinya tak lagi merasa nyaman berada di perusahaan pelat merah tersebut. Hal ini setelah sejumlah permintaan dan usulan pembenahan yang ia ajukan ditolak Jokowi. Perkara ini sendiri berangkat dari dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan minyak mentah dan distribusi BBM di lingkungan Pertamina dan anak usahanya. Berdasarkan perhitungan Kejaksaan Agung RI bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara hingga Rp 285 triliun. **BACA HAL 11..**

SKANDAL MIGAS DAN KERUGIAN NEGARA

**KERUGIAN NEGARA:**

Kerugian diperkirakan Rp285,1 triliun, melonjak dari estimasi awal Rp193,7 triliun setelah audit tata kelola minyak 2018–2023.

**MODUS IMPOR:**

Produksi kilang sengaja ditekan lewat rekayasa rapat, membuat minyak domestik tak terserap dan diekspor, sehingga impor mahal lewat broker jadi alasan.

**OPLOSAN BBM:**

BBM RON 90 dibeli, lalu dicampur dan ditagihkan sebagai RON 92, meski kualitas riil di bawah spesifikasi.

DAFTAR BEBERAPA TERSANGKA

DAN TERDAKWA UTAMA

Pihak Swasta & Pengusaha

**Muhammad Riza Chalid:**

Pengusaha minyak yang dijuluki "Gasoline Godfather"; ditetapkan sebagai tersangka utama dan masih dalam proses pengejaran (buron) per akhir 2025.

**Muhammad Kerry Adrianto Riza:**

Anak dari Riza Chalid dan beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa; saat ini berstatus terdakwa dan sedang menjalani persidangan.

**Gading Ramadhan Juedo:**

Komisaris PT Pelayaran Mahameru Kencana Abadi (PMKA).

**Dimas Werhaspati:**

Komisaris PT Jengjala Maritim Nusantara (JMN).

**Martin Haendra (MH):**

Mantan Business Development Manager PT Trafigura.

**Iwan Purwanto (IP):**

Business Development Manager PT Mahameru Kencana Abadi.

Internal Pertamina & Anak Perusahaan

**Riva Siahaan:**

Mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN); didakwa merugikan negara melalui kebijakan impor BBM.

**Yoki Firnandi:**

Mantan Direktur Utama PT Pertamina International Shipping (PIS) periode 2022–2024.

**Agus Purwono:**

Mantan Vice President (VP) Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

**Alfian Nasution:**

Mantan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga (pernah menjabat VP Supply & Distribusi 2011–2015).

**Maya Kusmaya:**

Mantan Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga.

**Edward Corne (EC):**

Mantan VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

**Sani Dinar Saifuddin:**

Direktur Optimalisasi dan Produk PT Pertamina Kilang Internasional.

**Hanung Budya Yuktyanta:**

Mantan Direktur Pemasaran dan Niaga PT Pertamina (Persero).

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) periode 2019–2024 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saat sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (27/1/2026). (Antara)

PENIPUAN DIGITAL CAPAI TRILIUNAN, REGISTRASI SIM CARD BIOMETRIK DIWAJIBKAN

Pemerintah resmi menerapkan kebijakan registrasi nomor seluler berbasis biometrik sebagai langkah serius memutus mata rantai penipuan digital yang nilainya telah menembus triliunan rupiah. Aturan ini mewajibkan aktivasi kartu SIM baru menggunakan pengenalan wajah (face recognition), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui Jaringan Bergerak Seluler.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan, kebijakan ini lahir dari tingginya keluhan masyarakat terhadap maraknya penipuan online yang memanfaatkan nomor telepon dengan identitas tidak jelas.



Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid dalam peluncuran Registrasi Biometrik di Gedung Sarinah, Jakarta, Selasa (27/2/2026). (ist)

POIN-POIN PENTING ATURAN BARU REGISTRASI SIM CARD KOMDIGI:

- **REGISTRASI BIOMETRIK (WAJAH):** Registrasi menggunakan pemindaian wajah (face recognition) yang disandingkan dengan NIK (WNI) atau Paspor (WNA) untuk mencegah penyalahgunaan identitas.
- **PEMBATASAN NOMOR:** Setiap individu dibatasi maksimal 3 kartu prabayar untuk setiap operator (misal: 3 kartu Telkomsel, 3 kartu Indosat, dst).
- **AKTIVASI KARTU PERDANA:** Kartu perdana dijual dalam kondisi non-aktif (blank), wajib diaktifkan langsung oleh pengguna melalui validasi wajah.
- **HAK PENGECEKAN & PEMBLOKIRAN:** Pengguna dapat mengecek nomor yang terdaftar atas NIK mereka dan mengajukan blokir jika ditemukan nomor tidak dikenal (fraud).
- **REGISTRASI ANAK DI BAWAH 17 TAHUN:** Menggunakan data biometrik kepala keluarga.
- **TUJUAN ATURAN:** Mengurangi penipuan digital (scam), judi online, dan kejahatan siber berbasis nomor seluler.
- **MASA BERLAKU:** Berlaku mulai Januari 2026, dengan transisi penuh diwajibkan.



Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menargetkan percepatan signifikan kecepatan internet nasional pada 2026. Pemerintah memutuskan memajukan target kecepatan internet yang semula direncanakan tercapai pada 2028 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), agar bisa diwujudkan lebih cepat.

"Sebagian besar penipuan online berawal dari nomor yang identitasnya tidak jelas. Registrasi biometrik memastikan setiap nomor terhubung dengan identitas yang valid," ujar Meutya saat peluncuran Registrasi Biometrik di Gedung Sarinah, Jakarta,

Selasa (27/1/2026).

Meutya menjelaskan, di tengah pesatnya perkembangan kejahatan digital, persoalan utama yang terus berulang adalah anonimitas nomor seluler yang tidak tervalidasi secara

Beda Data Komdigi dan Ookla tentang Mobile Broadband Indonesia

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan, pemerintah menargetkan kecepatan internet seluler atau mobile broadband mencapai 80 Mbps pada 2026. Sementara itu, kecepatan internet tetap atau fixed broadband ditetapkan menyentuh 64 Mbps.

"Kecepatan mobile broadband di seluruh ibu kota provinsi Indonesia di tahun 2025 mencapai 63,51 Mbps. Ini kita akan dorong untuk tahun 2026 menjadi 80 Mbps, atau melakukan percepatan dari target yang seharusnya di 2028," ujar Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI yang disiarkan secara daring, Senin (26/1/2026).

Untuk layanan fixed broadband, rata-rata kecepatan saat ini tercatat sebesar 51,84 Mbps. Target 64 Mbps yang dipatok untuk 2026 sejatinya merupakan target RPJMN tahun 2027, sehingga pemerintah juga melakukan percepatan satu tahun lebih awal.

Namun demikian, data perbandingan dari lembaga

independen Ookla menunjukkan angka yang berbeda. Berdasarkan laporan Ookla per Desember 2025, kecepatan unduh rata-rata internet seluler berada di level 52,73 Mbps, sedangkan fixed broadband tercatat 44,38 Mbps.

Diketahui, Ookla adalah perusahaan analitik internet global yang dikenal luas sebagai penyedia layanan Speedtest.

Selain peningkatan kecepatan, pemerintah juga menaruh fokus besar pada penguatan infrastruktur jaringan. Penetrasi jaringan 4G ditargetkan naik menjadi 99,05 persen dari capaian saat ini sebesar 98,95 persen. Adapun pengembangan jaringan 5G menjadi prioritas utama, dengan target cakupan 8,5 persen area permukiman pada 2026, meningkat dari 6,33 persen pada 2025.

"Terkait dengan rencana kami untuk menggelar lelang dari frekuensi 5G, mudah-mudahan di target 2026 ini bisa kita capai," tutur Meutya. (wid/ist,kcm/dya)

kuat. Kondisi tersebut membuka ruang bagi berbagai modus kejahatan digital.

"Penipuan online, spam call, spoofing, phishing, SIM swap fraud, social engineering, hingga penyalahgunaan OTP sangat bergantung pada anonimitas nomor. Jadi para pelaku kejahatan memanfaatkan celah identitas untuk menyamar, untuk menipu, lalu berpindah nomor ketika terdeteksi dengan nomor baru lainnya, dan ini yang membuat kejahatan digital terus-menerus berulang jika tidak kita putus mata rantainya," tuturnya.

Berdasarkan data yang diterima Kementerian Komdigi, kerugian akibat penipuan digital mencapai angka yang sangat besar. Dalam kurun waktu November 2024 hingga awal 2026, total kerugian akibat penipuan digital tercatat mencapai Rp 9,1 triliun.

"Kerugian akibat penipuan digital Rp 9,1 triliun dalam kurun waktu November 2024 hingga hari ini, jadi kurang lebih satu tahun lebih," ucap Meutya.

Selain itu, laporan lain menunjukkan bahwa fraud digital di ekosistem pembayaran Indonesia juga telah menyebabkan kerugian sekitar Rp 4,6 triliun hingga Agustus 2025. Bahkan, sekitar 22 persen atau lebih dari 50 juta pengguna internet di Indonesia dilaporkan pernah menjadi korban penipuan di ruang digital.

"Lebih jauh, 22% atau 50 juta lebih pengguna internet di Indonesia pernah ditipu di ruang digital. Jadi ini yang menjadi catatan kenapa kita kuatkan ini demi perlindungan konsumen," kata Meutya.

Dalam aturan baru ini, registrasi SIM card biometrik berlaku untuk kartu perdana atau aktivasi nomor baru. Kartu perdana wajib diedarkan dalam kondisi tidak aktif, dan hanya bisa digunakan setelah proses registrasi yang tervalidasi secara biometrik.

"Hari ini kita insya Allah memulai era baru registrasi pelanggan seluler menggunakan data kependudukan biometrik berupa pengenalan wajah," ujar Meutya dalam sambutannya.

Untuk warga negara Indonesia, proses registrasi dilakukan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang diverifikasi melalui pengenalan wajah. Sementara itu, warga negara asing wajib menggunakan paspor dan dokumen izin tinggal yang sah. Khusus pelanggan berusia di bawah 17 tahun, registrasi dilakukan dengan melibatkan identitas dan biometrik kepala keluarga.

Regulasi ini juga mengatur sejumlah ketentuan lain, mulai dari penerapan prinsip know your customer (KYC) oleh operator seluler, pembatasan kepemilikan nomor, hingga kewajiban perlindungan data pelanggan. (wid,kum,ist/dya)

DPR BENARKAN IURAN DEWAN PERDAMAIAAN GAZA RP16,8 T TAK MASUK APBN

Isu iuran Rp16,8 triliun atau setara 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza ditegaskan tidak bersumber dari APBN dan tidak bersifat wajib. DPR RI dan pemerintah memastikan kontribusi tersebut bersifat sukarela serta berkaitan dengan partisipasi rekonstruksi Gaza, bukan biaya keanggotaan.

Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,8 triliun untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza tidak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menyebut anggaran negara telah ditetapkan jauh sebelum isu iuran tersebut mencuat.

"Kalau dari APBN kan kita belum slot. APBN itu dikedok tanggal 23 September tahun lalu. Ketika diketok 187,1 triliun, tentu tidak ada itu (iuran 1 miliar dolar AS)," ujar Utut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (27/1/2026).

Isu iuran tersebut mencuat setelah Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan difokuskan pada upaya penghentian konflik serta rekonstruksi di Jalur Gaza. Dalam rancangan piagam dewan itu, disebutkan adanya kontribusi hingga



Menteri Luar Negeri Sugiono (kiri) membeberkan hasil rapat kerja (Raker) dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen, Gedung DPR RI, di Senayan, Jakarta pada Selasa (27/1/2026). (ist)

1 miliar dolar AS bagi negara yang ingin menjadi anggota tetap.

Utut tidak menampik kemungkinan pembiayaan berasal dari sumber lain di luar APBN, selama sesuai aturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, apabila iuran tersebut dibiayai dari sumber sah non-APBN, hal itu justru dapat dipandang sebagai kebanggaan

nasional.

"Nanti kalau memang ada sumber-sumber pembiayaan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini bagian dari national pride kita, kebanggaan nasional," katanya.

Ia juga menilai keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian berpotensi memberikan keuntungan strategis, termasuk dukungan

KEANGGOTAAN DAN PENDANAAN

- **NEGARA ANGGOTA:**
Hingga akhir Januari 2026, sekitar 21 hingga 35 negara telah bergabung.
- **PARTISIPASI INDONESIA:**
Indonesia resmi bergabung dalam dewan ini. Presiden Prabowo Subianto menandatangani pakta tersebut di Davos pada 22 Januari 2026, dengan alasan untuk mempercepat proses perdamaian dan bantuan kemanusiaan.
- **BIAYA KEANGGOTAAN:**
Dewan ini memperkenalkan model pendanaan baru di mana kursi permanen dikabarkan memiliki harga sebesar US\$1 miliar.
- **PENOLAKAN:**
Negara-negara seperti Prancis, Inggris, Norwegia, dan Swedia menolak bergabung karena dianggap berpotensi melanggar hukum internasional atau melemahkan sistem multilateral PBB.



Menakar Untung-Rugi Gabung Board of Peace

Keputusan Indonesia bergabung dalam Board of Peace for Gaza, dewan perdamaian yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump, memantik perdebatan luas di kalangan pengamat hubungan internasional. Langkah ini dinilai menyimpan peluang strategis, namun sekaligus membawa risiko serius terhadap citra dan konsistensi politik luar negeri Indonesia.

Di satu sisi, keanggotaan tersebut membuka akses langsung Indonesia ke pusat pengambilan keputusan global yang didominasi kekuatan besar. Namun di sisi lain, keterlibatan dalam inisiatif yang digagas Trump berpotensi menggerus posisi Indonesia sebagai negara non-blok dengan politik luar negeri bebas-aktif serta rekam jejak konsisten mendukung perjuangan Palestina.

Pengamat kebijakan hubungan internasional Fisipol UGM, Dafri Agusssalim, menilai keputusan ini harus dibaca secara seimbang dari dua sisi: potensi keuntungan dan risiko kerugian. Dari sisi positif, Indonesia memiliki peluang untuk terlibat langsung dalam proses perumusan kebijakan Dewan Perdamaian tersebut.

"Kalau kita masuk ke situ, mungkin kita bisa ikut berpartisipasi secara

langsung dalam pembuatan keputusan kebijakan dari lembaga itu. Harapannya keputusan kita itu tentu saja yang baik, artinya misalnya pro-Palestina dan seterusnya. Dibanding kita di luar, kalau di luar kita kan jadi enggak bisa ikut," kata Dafri.

Namun, Dafri mengingatkan peluang tersebut tidak serta-merta besar. Dominasi Amerika Serikat, terutama di bawah kepemimpinan Trump, dinilai akan membatasi ruang manuver negara-negara lain, termasuk Indonesia.

"Walaupun demikian, tadi saya sampaikan potensinya mungkin tidak terlalu besar. Mengingat dominasi dari negara-negara besar terutama Amerika," ujarnya.

Selain membuka akses politik, keikutsertaan Indonesia juga dapat dibaca sebagai langkah perlindungan kepentingan nasional. Dafri menilai, bergabungnya Indonesia berpotensi menjadi strategi hedging untuk menghindari tekanan Amerika Serikat, baik di bidang ekonomi, politik, maupun keamanan.

"Yang kedua mungkin bayangannya ketika kita masuk di situ mungkin kita menghindari menjadi target dari Amerika, terutama berhubungan dengan bidang ekonomi, politik,

keamanan semua. Dengan masuk ke situ kita melindungi diri gitu ya. Dari bidang perdagangan misalnya, mungkin kita tidak dikenai tarif yang tinggi," jelas Dafri.

"Di bidang politik mungkin kita tidak akan dianggap musuh. Dalam keamanan kita tidak menjadi target seperti Iran atau Venezuela atau macam-macam. Bagi negara ancumannya itu luar biasa, jadi mungkin itu menghindari," lanjutnya.

Meski demikian, Dafri menegaskan ada harga mahal yang harus dibayar. Salah satu dampak paling nyata adalah potensi terkikisnya citra Indonesia sebagai negara non-blok yang menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, sekaligus konsisten mendukung Palestina.

"Salah satu dampak yang langsung dirasakan yaitu citra kita sebagai negara 'non-blok'. Politik luar negeri yang bebas aktif. Kemudian pro-Palestina, itu bisa terhapus dengan masuknya kita menjadi anggota dewan perdamaian bentukan Trump ini, terutama di mata bangsa-bangsa atau negara-negara yang selama ini ya sejalan dengan kita seperti negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam, negara-negara Global South misalnya ya," kata Dafri. (wid,ist,blo/dya)

peralatan pertahanan, pelatihan, serta alih teknologi.

Sikap senada disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Juru Bicara Kemlu Vahd Nabyl A. Mulachela memastikan Indonesia tidak diwajibkan membayar iuran untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza. Ia menegaskan kontribusi dana tersebut bersifat sukarela.

"Pada dasarnya kontribusi anggaran tersebut bersifat sukarela, dan tanpa iuran pun tetap bisa menjadi anggota Dewan Perdamaian," ujar Vahd.

Ia menambahkan Indonesia memandang Dewan Perdamaian sebagai mekanisme sementara untuk menghentikan kekerasan dan melindungi warga sipil di Gaza setelah konflik berkepanjangan.

Penjelasan lebih lanjut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono. Ia menegaskan iuran yang dibahas bukanlah membership fee, melainkan bentuk partisipasi negara anggota dalam upaya rekonstruksi Gaza.

"Ini bukan membership fee, tapi kalau kita lihat kronologinya, Board of Peace ini merupakan upaya untuk menyelesaikan situasi di Gaza, termasuk rekonstruksi," kata Sugiono usai rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/1/2026). (tin,ist,kum/dya)

MENGUAT KABAR PHK 2.500 BURUH PABRIK KERTAS DI JATIM

Kabar gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali menguat di sektor industri nasional. Kali ini, sebanyak sekitar 2.500 buruh PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto, Jawa Timur, terancam kehilangan pekerjaan di tengah konflik internal perusahaan dan kebijakan pemerintah yang dinilai bermasalah. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menegaskan, ancaman PHK tersebut bukan disebabkan kondisi keuangan perusahaan yang merugi, melainkan akibat perselisihan keluarga pemilik perusahaan serta pencabutan izin operasional oleh pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Presiden KSPI Said Iqbal menyebut PT Pakerin sejatinya merupakan perusahaan yang sehat dan telah beroperasi puluhan tahun. Namun, konflik antarpemilik, yang merupakan kakak beradik, membuat operasional pabrik lumpuh.



Ratusan buruh PT. Pabrik Kertas Indonesia (PT. PAKERIN) Mojokerto, Jawa Timur berunjukrasa di Kementerian Hukum RI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jakarta, Rabu 14 Januari 2026.ist

“Perseteruan, konflik pemilik pabrik sama antarkeluarga, kakak beradik, maka uang perusahaan PT Pakerin yang ditempatkan di saudaranya BPR Bank Prima, dulu Bank Prima namanya, sekarang jadi BPR, nggak bisa dikeluarkan,” kata Said Iqbal, dikutip Selasa

(27/1/2026).

Ia mengungkapkan, sekitar Rp1 triliun dana operasional perusahaan disebut tersimpan di BPR Bank Prima dan tidak dapat ditarik akibat konflik kepemilikan tersebut. Kondisi ini membuat aktivitas produksi terhenti dan buruh tidak menerima upah

selama berbulan-bulan.

Masalah kian rumit setelah izin operasional perusahaan dicabut oleh Kementerian Hukum dan HAM pada periode sebelumnya. Padahal, menurut KSPI, Mahkamah Agung telah memutuskan bahwa PT Pakerin tetap dapat beroperasi.

“Hasil keputusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa pabrik Pakerin tetap bisa beroperasi, sudah ada keputusan Mahkamah Agung,” ujar Said.

Namun demikian, ia menyoroti kebijakan Menteri Hukum dan HAM saat itu, Yasonna H. Laoly, yang menerbitkan keputusan pencabutan izin operasional perusahaan.

“Tapi ini oleh Kementerian Hukum dan HAM yang lama, bukan yang sekarang ya, bukan Pak Supratman, bukan. [Tapi] Pak Yasonna Laoli, mengeluarkan semacam keputusan yang mencabut izin operasional,” katanya.

Dampak dari pencabutan izin tersebut sangat dirasakan para pekerja. Aktivitas pabrik berhenti total dan ribuan buruh terkatung-katung tanpa kepastian.

“Sudah 3 bulan buruh gak dibayar upahnya. Pabriknya nggak jalan. Ada 2.500. [Buruh terancam PHK],” kata Said.

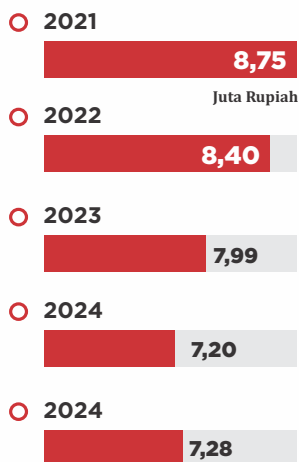
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur Jazilul menambahkan, sebagian buruh bahkan sudah hampir setahun tidak bekerja sejak perusahaan mulai berhenti beroperasi pada pertengahan 2025.

“Sudah hampir 1 tahun, Mas, (buruh PT Pakerin) tidak bekerja,” ujarnya.

Menurut Jazilul, konflik keluarga pemilik mencuat setelah pendiri perusahaan meninggal dunia. Anak pertama selaku direktur utama dan pemegang saham disebut berselisih dengan dua adiknya, hingga berujung pada sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Agung. Putusan MA yang membatalkan Surat Keputusan Administrasi Hukum Umum (AHU) tak kunjung mengakhiri konflik karena terbitnya sejumlah SK pembatalan lanjutan.

Di tengah ancaman PHK tersebut, KSPI mendesak pemerintah pusat dan Presiden Prabowo Subianto untuk turun tangan menyelesaikan persoalan, mengembalikan izin operasional, serta membuka akses dana perusahaan agar PHK dapat dicegah. (gus,rls,kcm/dya)

JUMLAH PENGANGGURAN INDONESIA (DATA PER FEBRUARI)



Sumber BPS

Pengangguran Jadi Risiko Terbesar Ekonomi Indonesia hingga 2028

Forum ekonomi global itu juga menyoroti keterbatasan peluang kerja sebagai refleksi dari persoalan struktural di pasar tenaga kerja. Masalah tersebut meliputi stagnasi upah, meningkatnya angka pengangguran dan setengah menganggur, serta melemahnya perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Selain itu, pergeseran kebutuhan tenaga kerja akibat otomatisasi dan transisi menuju ekonomi hijau, terbatasnya mobilitas sosial, serta ketimpangan akses terhadap pendidikan dan teknologi dinilai turut memperbesar risiko pengangguran di Indonesia.

Temuan WEF tersebut diakui Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Sarman Simanjorang, yang menilai kondisi di lapangan menunjukkan gejala serupa. Ia mencatat, setiap tahun Indonesia melahirkan hampir tiga juta calon tenaga kerja baru dari lulusan SMA, SMK, diploma, hingga perguruan tinggi.

Tanpa penciptaan lapangan kerja yang memadai, penumpukan pengangguran dinilai sulit dihindari, terlebih dengan maraknya pemutusan

hubungan kerja (PHK) akibat tekanan ekonomi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Karena itu, Sarman mendorong pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis nasional yang berpotensi menyerap tenaga kerja, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), penguatan koperasi Merah Putih, percepatan hilirisasi industri, serta menarik investasi berbasis padat karya.

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Universitas Katolik Atma Jaya, YB. Suhartoko, menilai pengangguran menjadi risiko terbesar perekonomian Indonesia karena struktur ekonomi nasional yang masih didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurutnya, sektor UMKM menyerap lebih dari 90 persen tenaga kerja nasional. Dengan demikian, peningkatan pengangguran hampir pasti berasal dari sektor tersebut.

“Kondisi ini otomatis akan menurunkan pertumbuhan, karena UMKM berkontribusi 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB),” ungkap Suhartoko. (wid,ist,krij/dya)

LAPORAN yang dirilis akhir pekan lalu itu melibatkan lebih dari 11.000 pemimpin bisnis di 116 negara dan memetakan berbagai risiko ekonomi prioritas yang dihadapi masing-masing negara. Berdasarkan Executive Opinion Survey 2025, para pelaku usaha menempatkan kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran sebagai risiko paling serius bagi Indonesia pada periode 2026–2028.

Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 27 negara yang menempatkan isu pengangguran di posisi teratas dalam daftar risiko ekonomi. WEF menilai, memburuknya prospek lapangan kerja tidak hanya menekan kinerja ekonomi, tetapi juga berpotensi memicu dampak sosial dan politik yang lebih luas.

“Kurangnya peluang ekonomi atau pengangguran dapat mendorong ekstremisme, menurunkan kepercayaan terhadap institusi, serta memperparah dampak misinformasi dan disinformasi,” tulis WEF dalam laporannya.

GEMPA BERUNTUN GUNCANG JAWA, BMKG TEGASKAN PACITAN DAN BANTUL TAK BERKAITAN

Indonesia kembali menghadapi tekanan bencana berlapis. Saat penanganan banjir dan longsor masih berlangsung di sejumlah wilayah, aktivitas seismik meningkat dan mengguncang Pulau Jawa pada Selasa (27/1/2026). Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat rangkaian gempa bumi terjadi di Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, hingga Jawa Tengah, memicu kewaspadaan dan penghentian sementara sejumlah layanan publik. Masyarakat diminta tidak panik.

Gempa terbesar terjadi pada pagi hari di wilayah Pacitan, Jawa Timur. BMKG melaporkan gempa bermagnitudo 5,5 hingga 5,7 terjadi pukul 08.20 WIB dengan pusat gempa berada di darat, sekitar 24–25 kilometer timur laut Pacitan, pada kedalaman lebih dari 100 kilometer. Gempa tersebut dipicu oleh aktivitas deformasi batuan dalam lempeng subduksi.

Getaran gempa Pacitan dirasakan cukup luas hingga wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, Solo, bahkan Bali. Meski demikian, BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami dan hingga kini belum ada laporan kerusakan signifikan.

Beberapa jam berselang, gempa kembali mengguncang wilayah DIY. Pada pukul 13.10–13.15 WIB, gempa bermagnitudo 4,5 terjadi di Bantul dengan pusat gempa berada di darat, sekitar 16 kilometer arah timur wilayah tersebut, pada kedalaman dangkal sekitar 11 kilometer. Gempa ini terasa kuat di Bantul, Kota Yogyakarta, Sleman, Gunungkidul, Kulon Progo, hingga Klaten dan Solo.

Menanggapi kekhawatiran publik, BMKG menegaskan bahwa gempa Pacitan dan Bantul tidak saling berkaitan. Kepala Stasiun Geofisika Sleman Ardhianto Septiadhi menyampaikan perbedaan sumber gempa menjadi faktor utama.

"Gempa dengan sumber yang berbeda. Jadi tidak berkaitan," kata Ardhianto saat ditemui di kantornya di Gamping, Sleman, Selasa (27/1/2026).

Ia menjelaskan, gempa di Bantul dipicu oleh aktivitas Sesar Opak, sementara gempa Pacitan bersumber dari aktivitas lempeng subduksi di selatan Jawa.

"Kalau di Bantul ini kan (pemicu) Sesar Opak. Kalau yang di Pacitan itu adalah aktivitas lempeng subduksi," ujarnya.

BMKG juga mencatat aktivitas gempa susulan pascagempa Bantul. Hingga pukul 14.45 WIB, tercatat sebanyak 23 gempa susulan dengan magnitudo kecil berkisar antara 1 hingga 2.

"Sampai di pukul 14.45, satu jam setelah itu total adalah 23 kali kejadian dengan magnitudo berkisar 1 sampai 2 skala



magnitudo. Dari pantauan kami kekuatannya meluruh atau mengecil," jelas Ardhianto.

BMKG memastikan hingga saat ini belum ada laporan kerusakan signifikan akibat gempa Bantul dan hasil pemodelan menunjukkan tidak adanya potensi tsunami.

Di sisi lain, dampak gempa turut

dirasakan pada sektor transportasi. PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 6 Yogyakarta menghentikan sementara seluruh perjalanan kereta api di wilayah operasionalnya yang mencakup DIY dan Jawa Tengah bagian selatan. Langkah ini diambil sebagai prosedur keselamatan pascagempa.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, mengatakan sebanyak 17 perjalanan kereta api terdampak akibat penghentian sementara tersebut. (wid,ist,kum/dya)

GEMPA SIGNIFIKAN SELASA, 27/1/2026

- Pacitan, Jawa Timur:**
Gempa bermagnitudo 5,5 (hingga 5,7) terjadi pukul 08:20 WIB. Pusat gempa berada di darat, sekitar 25 km timur laut Pacitan dengan kedalaman 105 km, dipicu oleh aktivitas Sesar Grindulu. Getaran terasa hingga Yogyakarta, Solo, dan Bali, namun tidak berpotensi tsunami.
- Bantul, D.I. Yogyakarta:**
Diguncang gempa beruntun dengan magnitudo terbesar 4,4 hingga 4,5 pada pukul 13:10 WIB. Pusat gempa berada di darat, 16 km timur laut Bantul, dan terasa hingga Solo serta Klaten.
- Cilacap, Jawa Tengah:**
Terjadi gempa magnitudo 4,2 pada pukul 15:18 WIB di laut, sekitar 61 km barat daya Cilacap. Sebelumnya, tercatat pula gempa kecil magnitudo 2,6 dan 2,8 di wilayah yang sama pada pagi hari.

Wilayah Lainnya:

- Bayah, Banten:**
Gempa magnitudo 2,9 di laut pukul 21:00 WIB (estimasi).
- Purworejo, Jawa Tengah:**
Gempa darat dilaporkan terjadi pada Selasa pagi.
- Poso, Sulawesi Tengah:**
Tercatat adanya aktivitas gempa pada hari yang sama.



musim hujan masih terjadi di bulan Januari hingga di awal Februari tahun ini," sambung dia.

Di tengah tingginya curah hujan, BMKG juga mengungkap fakta meningkatnya dampak siklon tropis terhadap Indonesia. Dalam catatan 55 tahun terakhir, terdapat lima siklon tropis yang lintasannya mendekati atau memasuki wilayah Indonesia. (wid,ist,dtc/dya)

Hujan Lebat Masih Mengintai, Siklon Tropis Kian Berdampak

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan potensi cuaca ekstrem masih akan melanda sejumlah wilayah Indonesia hingga akhir Januari 2026. Ancaman tersebut tidak hanya berupa hujan lebat di Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi juga dampak siklon tropis yang dalam beberapa tahun terakhir semakin terasa di wilayah Indonesia.

Peringatan ini disampaikan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). BMKG memprediksi pada periode 26–28 Januari 2026, intensitas curah hujan di sejumlah daerah masih tergolong tinggi, termasuk di kawasan Jabodetabek.

"Kami sampaikan bahwa daerah yang untuk seminggu ke depan, tanggal 26, 27, 28 ini, yang cukup tinggi adalah di daerah Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian

seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara," kata Faisal.

BMKG mencatat, pada penghujung Januari ini, hujan masih berada dalam kategori lebat dengan potensi curah hujan harian mencapai 50 hingga 100 milimeter.

"Ini adalah kondisi di akhir bulan Januari ini di mana hujannya masih cukup tinggi atau hujan lebat 50 sampai 100 mm per hari," sambung dia.

Faisal menjelaskan, puncak musim hujan di Pulau Jawa masih berlangsung hingga Januari dan awal Februari 2026. Sementara itu, musim kemarau diperkirakan mulai terjadi pada Mei dan berlanjut hingga pertengahan tahun.

"Tapi, kalau di Jawa, ini sekarang kita cukup banyak hujannya kondisinya masih cukup yang hijau tadi itu. Kemudian makin lama makin mengering, kemudian bulan Mei, Juni, dan Juli itu adalah musim kering di daerah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara," ujarnya. "Jadi puncak

Kematian Akibat DBD Tinggi, Kota Malang Waspada Puncak Kasus Maret-April



Ilustrasi: Petugas Puskesmas melakukan salah satu kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) di rumah-rumah warga. (dok. Dinkes Kota Malang)

MALANG - Angka kematian akibat demam berdarah dengue (DBD) di Kota Malang mengalami peningkatan pada tahun 2025. Kondisi ini membuat Dinas Kesehatan (Dinkes) meningkatkan kewaspadaan. Terutama menjelang periode puncak kasus DBD yang diperkirakan terjadi pada Maret hingga April.

"Setiap tahun DBD masih ada dan jumlahnya cukup besar. Memang di 2025 jumlahnya berkurang dari tahun 2024. Tetapi angkanya masih tinggi, artinya DBD masih menjadi ancaman

kesehatan di Kota Malang," ujar Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, Selasa (27/1/2026).

Berdasarkan data, Husnul menyebut pada tahun 2023 hingga 2025, tercatat total 1.954 kasus DBD di Kota Malang. Dari jumlah tersebut, angka kematian akibat DBD justru mengalami kenaikan pada 2025.

Dirincinya, pada 2023 tercatat sebanyak 462 kasus DBD dengan 4 orang meninggal dunia. Jumlah kasus kemudian melonjak pada 2024 menjadi 777 kasus, dengan angka

kematian tercatat sebanyak 4 orang. Sementara pada 2025, jumlah kasus menurun menjadi 715 kasus, namun angka kematian meningkat menjadi 5 orang.

Husnul menjelaskan, tren kasus DBD di Kota Malang juga menunjukkan pola musiman. Berdasarkan evaluasi Dinkes, puncak kasus DBD umumnya terjadi pada bulan Maret hingga April, seiring meningkatnya curah hujan yang memicu banyaknya genangan air bersih sebagai tempat berkembang biaknya nyamuk *Aedes aegypti*.

"Kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama di bulan Maret sampai April. Tahun kemarin, puncak DBD juga terjadi pada periode tersebut," jelasnya.

Dari sisi wilayah, Husnul menyebutkan Kecamatan Sukun tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus DBD tertinggi di Kota Malang. Pada 2024 dan 2025, jumlah kasus di kecamatan tersebut masing-masing mencapai 192 kasus, sehingga menjadi salah satu wilayah prioritas pengendalian DBD.

Lebih lanjut, untuk menekan kasus DBD, Husnul mengaku pihaknya terus menggalakkan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) melalui gerakan 3M, yakni menguras dan menutup tempat

penampungan air, serta mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi sarang nyamuk.

Selain itu, masyarakat juga didorong untuk menerapkan gerakan 3M Plus. Mulai dari menanam tanaman pengusir nyamuk, memeriksa tempat penampungan air secara rutin, memelihara ikan pemakan jentik, hingga menggunakan obat anti nyamuk.

"Kami juga sudah menginstruksikan 16 puskesmas dan 33 puskesmas pembantu (pustu) di Kota Malang untuk lebih aktif memberikan edukasi dan meningkatkan pemantauan lingkungan, terutama menjelang puncak kasus DBD," katanya.

Pasalnya hingga saat ini, menurutnya Angka Bebas Jentik (ABJ) masih berada di kisaran 92 persen, belum mencapai target ideal sebesar 95 persen. Selisih tersebut dinilai cukup signifikan dan berkontribusi terhadap masih ditemukannya kasus DBD.

"Selisihnya memang hanya sekitar tiga persen, tetapi dampaknya besar. Selama ABJ belum mencapai target, potensi penularan DBD masih tetap ada. Makanya kami optimalkan terus pencegahan melalui PSN dan 3M plus itu tadi," tegasnya. (Santi/Dya)

Soal Pj Sekda, Pemkot Batu Siapkan Pejabat Internal

BATU- Pemerintah Kota (Pemkot) Batu memprioritaskan pejabat internal untuk mengisi posisi Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda). Langkah ini diambil guna menjaga stabilitas dan efektivitas birokrasi pasca perombakan besar-besaran.

Wali Kota Batu, Nurochman, menegaskan Sekda memiliki peran strategis sebagai pengoordinasi seluruh perangkat daerah. Oleh karena itu, jabatan tersebut tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama tanpa pejabat definitif. Pasalnya, berpotensi mengganggu efektivitas kerja birokrasi dan pelayanan publik.

"Sekda ini kan posisi strategis yang mengoordinasikan seluruh perangkat daerah. Maka jabatan ini tidak boleh dibiarkan kosong terlalu lama. Kami juga sudah meminta pelaksana harian (Plh) Sekda untuk segera menyiapkan tahapan menuju pengisian penjabat (Pj) Sekda," ujar Nurochman, dikutip pada Selasa (27/1/2026).

Untuk diketahui, sementara ini jabatan Sekda Kota Batu telah diisi oleh Pelaksana Harian yang dijabat oleh Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Batu, Eny

Rachyuningsih.

Sebagai langkah awal, pria yang akrab dengan sapaan Cak Nur, ini menuturkan Plh Sekda telah ditugaskan untuk mengusulkan nama calon Penjabat (Pj) Sekda kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pengusulan tersebut menjadi bagian dari mekanisme formal sebelum dilakukannya pengisian Sekda definitif melalui seleksi terbuka.

Ditegaskannya, Pemkot Batu memprioritaskan pejabat eselon dari internal pemerintahan daerah sebagai calon Pj Sekda. Menurutnya, pejabat internal dinilai memiliki keunggulan dari sisi pengalaman, kapasitas, serta pemahaman terhadap karakter dan sistem birokrasi di Kota Batu.

"Kami sudah kirimkan ke provinsi. Kita berkejaran dengan waktu. Untuk calon Pj Sekda, kami memprioritaskan internal Pemkot Batu. Banyak pejabat eselon kami yang memiliki kapasitas, pengalaman, dan pemahaman mendalam terkait birokrasi daerah," tegasnya.

Setelah Pj Sekda ditetapkan oleh pemerintah provinsi, Pemkot Batu akan segera menggelar seleksi terbuka (selter) atau open bidding untuk

mengisi jabatan Sekda definitif. Cak Nur menargetkan seluruh tahapan seleksi tersebut dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari 3 bulan.

Ia menekankan, percepatan proses pengisian jabatan tetap harus berjalan sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku, tanpa mengesampingkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Selain pengisian jabatan Sekda, Pemkot Batu juga telah menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) pada sejumlah jabatan strategis lainnya. Beberapa posisi yang diisi Plt di antaranya Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan (Diskumperindag), serta Sekretaris DPRD Kota Batu.

Penunjukan Plt tersebut dilakukan untuk memastikan kesinambungan pelaksanaan program dan agenda pembangunan daerah tetap berjalan di



Wali Kota Batu, Nurochman. (dok. Prokopim Kota Batu)

tengah proses rotasi dan pengisian jabatan struktural.

Dalam kesempatannya ini, Cak Nur juga menepis anggapan adanya kekosongan kepemimpinan di tubuh birokrasi Pemkot Batu. Ia menyebut, ketersediaan sumber daya manusia di internal pemerintahan daerah dinilai masih mencukupi untuk menopang jalannya roda pemerintahan. (Santi/Dya)

DARURAT NIPAH DI INDIA, DUNIA WASPADA

Otoritas kesehatan India menetapkan langkah darurat menyusul munculnya kembali kasus virus Nipah di negara bagian Benggala Barat. Lebih dari 100 orang kini menjalani karantina mandiri setelah lima kasus positif terkonfirmasi, termasuk tenaga kesehatan. Perkembangan ini memicu kewaspadaan global, mengingat virus Nipah dikategorikan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebagai patogen prioritas dengan risiko epidemi tinggi.

Lima kasus tersebut terdiri atas tiga infeksi baru yang dilaporkan otoritas setempat, menambah dua kasus perawat yang sebelumnya dinyatakan positif. Berdasarkan laporan Press Trust India, tiga kasus terbaru melibatkan seorang dokter, seorang perawat, dan seorang staf kesehatan.

Para pasien dengan infeksi terbaru kini dirawat di rumah sakit penyakit menular Belegghata di wilayah timur Kolkata, sementara dua pasien sebelumnya masih menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit swasta.

Seorang pejabat senior Departemen Kesehatan Benggala Barat menyebut kondisi pasien masih beragam. "Kondisi perawat laki-laki membaik tetapi pasien perempuan tetap sangat kritis. Keduanya dirawat di ICCU (Intensive Coronary Care Unit)," ujarnya, seperti dikutip Independent, Selasa (27/1/2026).

Virus Nipah dikenal sebagai



Perawat diduga terinfeksi virus Nipah sedang sakit kritis dan membutuhkan bantuan hidup di sebuah rumah sakit swasta di Barasat di 24 Parganas Utara, di pinggiran Kolkata. (dok.ist)

penyakit zoonosis mematikan yang dapat menular dari hewan ke manusia dan dalam kondisi tertentu menyebar antarmanusia. Mantan Presiden Indian Medical Association (IMA) Cabang Cochin, Rajeev Jayadevan, menjelaskan bahwa infeksi pada manusia sebenarnya jarang terjadi dan umumnya disebabkan kontak tidak sengaja dengan kelelawar.

"Risiko ini lebih tinggi di daerah pedesaan atau dekat hutan, di mana praktik pertanian meningkatkan kontak antara manusia dan kelelawar buah yang mencari makanan," kata Jayadevan.

Para ahli di India memperingatkan bahwa virus Nipah telah lama berada pada populasi kelelawar terbang selama ribuan

GEJALA DAN RISIKO

- Infeksi ini memiliki tingkat kematian yang sangat tinggi (mencapai 40%-75%) dan hingga saat ini belum ada vaksin atau obat spesifik. Gejala umum meliputi:
 - Demam, sakit kepala, dan nyeri otot.
 - Gejala pernapasan akut (seperti batuk dan sesak napas).
 - Ensefalitis (peradangan otak) fatal yang dapat menyebabkan kebingungan hingga koma.

CARA PENULARAN

- **Kontak Langsung:** Menyentuh hewan yang terinfeksi (kelelawar atau babi) atau cairan tubuhnya.
- **Konsumsi Makanan:** Memakan buah atau produk (seperti nira) yang terkontaminasi air liur atau urin kelelawar buah.
- **Antarmanusia:** Melalui kontak erat dengan sekret atau cairan tubuh pasien yang terinfeksi.

LANGKAH PENCEGAHAN

- **Hindari Paparan:** Jangan mengonsumsi buah yang terdapat bekas gigitan hewan atau nira mentah.
- **Kebersihan Diri:** Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
- **Kontak Ternak:** Menggunakan alat pelindung diri jika harus berinteraksi dengan hewan ternak, terutama babi, di daerah terdampak.
- **Etika Sakit:** Segera gunakan masker dan lakukan isolasi mandiri jika mengalami gejala pernapasan setelah bepergian dari wilayah wabah.



tahun. Kekhawatiran utama saat ini adalah potensi munculnya strain mutasi yang lebih mudah menular. Virus ini diketahui dapat menyebar melalui cairan tubuh seperti air liur, urin, dan darah, termasuk dalam konteks perawatan pasien.

Hingga kini, belum tersedia vaksin maupun pengobatan spesifik untuk virus Nipah. Tingkat kematian akibat infeksi ini tergolong tinggi, berkisar antara 40 hingga 75 persen. Sejak pertama kali muncul di India pada 2018, virus Nipah telah menyebabkan kematian puluhan orang, terutama di negara bagian Kerala. Secara historis, virus ini pertama kali dikenali pada 1998 dalam wabah di kalangan peternak babi di Malaysia dan Singapura.

Lonjakan kasus di India turut memicu kewaspadaan di negara-negara kawasan Asia. Thailand, salah satu destinasi wisata utama Asia Tenggara, memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus infeksi virus Nipah pada manusia di negaranya. Otoritas Pariwisata Thailand (TAT) menegaskan kondisi pariwisata tetap aman dan ramah bagi wisatawan internasional. (ind,ist,tha,gus/dya)

Kemenkes RI Larang Buah Bekas Gigitan Kelelawar Dikonsumsi

KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi masuknya virus Nipah ke Indonesia seiring munculnya kembali kasus penyakit mematikan tersebut di India. Salah satu langkah pencegahan utama yang ditekankan kepada masyarakat adalah tidak mengonsumsi buah yang terdapat bekas gigitan kelelawar.

"Tidak mengonsumsi buah dengan bekas gigitan kelelawar. Kemudian cuci dan kupas buah secara menyeluruh sebelum dikonsumsi," ujar Juru Bicara Kemenkes Widyawati, Selasa (27/1/2026).

Selain itu, masyarakat juga diminta menghindari kontak dengan hewan yang berpotensi terinfeksi, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Upaya tersebut meliputi mencuci tangan dengan sabun, mengonsumsi makanan bergizi, beristirahat cukup, dan rutin beraktivitas fisik guna menjaga imunitas tubuh.

Berdasarkan pemantauan global bersama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), hingga 23 Januari 2026 dilaporkan terdapat dua kasus terkonfirmasi dan tiga kasus suspek virus Nipah di West Bengal, India. Menyikapi situasi tersebut, Kemenkes menegaskan hingga saat ini belum ditemukan kasus virus Nipah di Indonesia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan virus Nipah memiliki tingkat kematian yang tinggi dan berasal dari hewan, terutama kelelawar. Oleh karena itu, kewaspadaan masyarakat menjadi kunci pencegahan.

"Virus Nipah itu banyaknya di India sama Bangladesh. Ini memang fatality ratenya tinggi, dia berasal dari kelelawar, jadi kalau bisa makan buah yang kemungkinan tersentuh oleh kelelawar ini," ujar Menkes di Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Ia menegaskan pemerintah terus melakukan pemantauan dan telah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk kesiapan alat

deteksi. "Kita sudah mempersiapkan, sudah sosialisasi, dan kita sudah siapin reagen PCR-nya. Sama kayak virus, tesnya pakai PCR," kata Budi.

Kemenkes juga mengimbau masyarakat yang berencana melakukan perjalanan ke India, Bangladesh, atau negara terjangkit lainnya agar mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di negara tujuan. Widyawati menyarankan pelancong segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak napas, muntah, hingga penurunan kesadaran atau kejang dalam waktu 14 hari setelah kepulangan.

Di sisi lain, kewaspadaan juga diminta diperketat di pintu masuk negara. Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, mengingatkan pemerintah agar tidak lengah meski kasus virus Nipah belum ditemukan di Tanah Air.

"Kewaspadaan di pintu masuk negara tetap harus ditingkatkan," kata Irma saat dihubungi di Jakarta, Selasa (27/1/2026). (wid,ist,rls/dya)

TREN COLOR WALKING SEBAGAI CARA SEDERHANA MENJAGA KESEHATAN MENTAL

Belakangan ini, media sosial diramaikan oleh tren color walking sebagai bagian dari hidup sehat oleh masyarakat yang menekankan keseimbangan antara pikiran dan tubuh seseorang.

Aktivitas ini banyak dibagikan melalui unggahan video di platform Tiktok maupun Instagram. Berbeda dengan jalan sehat pada umumnya, color walking justru mengajak pelakunya untuk melambat.

Secara sederhana, color walking adalah aktivitas jalan santai sambil menyebutkan warna-warna yang ditemuinya di sekitar.

Misalnya, jika pelaku memilih warna merah, pelaku akan mengamati benda-benda yang berwarna merah. Meski terlihat sederhana, color walking memiliki banyak manfaat bagi kesehatan terutama untuk kesehatan mental.

Meredakan stress dan kecemasan

Salah satu manfaat utama color walking adalah membantu seseorang untuk meredakan stress dan kecemasan. Ketika seseorang memusatkan perhatian pada warna di sekelilingnya, otak secara perlahan mengalihkan fokus dari pikiran yang membebani mental.

Kegiatan ini memberi efek relaksasi karena system saraf menjadi lebih tenang, detak jantung melambat, dan ketegangan berkurang. Aktivitas ini sangat membantu individu yang kerap merasa gelisah, mudah lelah secara emosional, atau mengalami tekanan akibat pekerjaan.

Meningkatkan suasana hati (mood)

Selain meredakan stress dan kecemasan, kegiatan ini juga berfungsi dalam meningkatkan suasana hati (mood).

Warna-warna tertentu memiliki efek psikologis yang berbeda. Misalnya, warna hijau yang sering ditemukan pada pepohonan dan dedaunan di taman dikaitkan dengan rasa segar, sedangkan warna biru pada langit memberikan memberikan efek menenangkan dan membantu menurunkan stress pada otak.

Dengan mengamati macam-macam warna secara sadar, otak menerima rangsangan positif yang memicu perasaan bahagia dan rileks, sekaligus membantu menurunkan tingkat stres serta membuat pikiran terasa lebih tenang dan fokus pada momen saat ini.

Melatih fokus dan konsentrasi

Manfaat lain yang tak kalah penting adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi. Di era kemajuan digitan ini. Perhatian manusia kerap terpecah oleh banyaknya notifikasi di gawai.

Color walking dapat melatih kemampuan otak untuk berfokus pada satu perhatian yang sederhana dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan ini jika dilakukan secara rutin dapat meningkatkan fokus seseorang dalam beraktivitas sehari-hari atau saat bekerja maupun belajar.

Mempertajam daya ingat dan ketajaman otak

Selain memberi efek menenangkan, color walking juga menjadi sarana untuk mempertajam

daya ingat dan melatih ketajaman otak. Secara alami, warna memiliki kekuatan untuk menarik perhatian seseorang. Berdasarkan studi tahun 2013 dalam The Malaysian Jurnal of Medical Sciences, warna-warna terang dapat membantu otak dalam menyimpan informasi secara efektif.

Dengan berfokus pada warna tertentu saat berjalan, seseorang secara tidak langsung akan melatih kepekaan otak untuk menangkap setiap detail visual yang mungkin selama ini terlewatkan dalam rutinitas harian.

Aktivitas ini juga membantu mengalihkan pikiran dari stres, kekhawatiran, maupun paparan layar gawai yang berlebihan, sehingga memberi ruang bagi pikiran untuk beristirahat sejenak dan lebih hadir pada momen saat ini.

Tidak hanya dari segi kesehatan mental, dari sisi kesehatan fisik color walking tetap memberikan manfaat layaknya aktivitas jalan kaki pada umumnya.

Aktivitas berjalan kaki secara teratur dapat membantu melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, memperkuat otot kaki, serta meningkatkan kebugaran jasmani secara keseluruhan.

Meski dilakukan dengan intensitas ringan, jika dilakukan secara rutin color walking dapat membantu menjaga berat badan tetap stabil, meningkatkan energi harian, serta mengurangi rasa lelah akibat duduk terlalu lama.

Ketika tubuh bergerak secara aktif dan pikiran berada dalam kondisi lebih tenang, kualitas tidur pun berpotensi membaik.

Rasa rileks yang muncul setelah berjalan sambil berlatih mindfulness dapat

membantu tubuh lebih mudah memasuki fase istirahat pada malam hari. Selain itu, aktivitas ini juga dapat meningkatkan suasana hati dan menumbuhkan perasaan positif setelah beraktivitas seharian.

Menariknya, color walking tergolong mudah dilakukan dan bersifat inklusif. Aktivitas ini tidak memerlukan peralatan khusus, keahlian tertentu, maupun lokasi khusus.

Cukup memilih waktu singkat, sekitar 10 hingga 20 menit, dan melakukannya di area yang aman seperti sekitar rumah, taman, atau jalur pejalan kaki.

Fleksibilitas ini membuat color walking cocok diterapkan oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, pekerja kantoran, hingga lansia.

Di tengah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental, tren color walking menjadi pengingat bahwa perawatan diri tidak selalu harus rumit atau mahal.

Dengan memadukan aktivitas fisik ringan dan latihan mindfulness, color walking menawarkan cara sederhana untuk menenangkan pikiran, memperbaiki suasana hati, serta membangun hubungan yang lebih sehat dengan diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Praktik sederhana ini juga bisa menjadi pintu masuk bagi mereka yang ingin mulai menerapkan gaya hidup aktif dan mindful, tetapi kerap merasa kesulitan memulai.

Color walking tidak menuntut target jarak atau kecepatan, sehingga dapat dilakukan dengan santai sesuai kemampuan masing-masing.

Dengan konsistensi, aktivitas ini berpotensi menjadi kebiasaan positif yang mendukung keseimbangan antara kesehatan fisik, mental, dan emosional dalam jangka panjang. (Inna – UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)



Fenomena Langka! Komet Besar C/2025 R3 Diprediksi Melintas Dekati Bumi

Para peneliti bidang astronomi mulai mengamati kemunculan sebuah komet baru. Komet ini diprediksi berpotensi menjadi "komet besar" pada tahun 2026. Jika cukup terang, objek langit tersebut bahkan bisa disaksikan dengan mata telanjang tanpa alat bantu saat melintasi bumi.

Saat ini, komet tersebut berada di jalur lintasan yang mengarah ke orbit Bumi. Para ilmuwan memperkirakan, komet ini akan mencapai jarak terdekatnya dengan planet kita dalam waktu kurang dari empat bulan. Kondisi ini membuka peluang langka bagi penelitian astronomi.

Komet tersebut diberi nama C/2025 R3. Nama ini merujuk pada waktu penemuannya, yakni 8 September 2025. Komet ini terdeteksi melalui citra Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System (Pan-STARRS), sepasang teleskop reflektor berdiameter 1,8 meter yang berada di puncak Gunung Haleakalā, Hawaii.

"Komet itu saat ini berjarak sekitar 348 juta kilometer dari Bumi, atau berada di antara orbit Jupiter dan Mars," menurut TheSkyLive.com.

C/2025 R3 tergolong komet berperiode panjang. Komet ini diperkirakan membutuhkan lebih dari 1.000 tahun untuk mengelilingi Matahari satu kali. Para astronom menduga, komet ini berasal dari Awan Oort, wilayah di tepi Tata Surya yang menjadi tempat berkumpulnya komet dan benda langit lain.

Hingga kini, jalur orbit komet tersebut belum dapat ditentukan secara pasti. Karena itu, periodenya juga belum diketahui. Namun, temuan serupa dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya komet yang tidak melintasi wilayah dekat Bumi selama puluhan ribu tahun.

Saat ini, C/2025 R3 terus bergerak mendekati Matahari. Komet ini diperkirakan mencapai perihelion, titik terdekat dengan Matahari, pada 20 April 2026. Pada saat itu, jaraknya hanya sekitar 76,3 juta kilometer, berada di antara orbit Merkurius dan Venus.

Sekitar sepekan kemudian, tepatnya 27 April, komet ini akan berada pada jarak terdekatnya dengan Bumi. Jaraknya sekitar 70,8 juta



kilometer, atau lebih dari 180 kali jarak Bumi ke Bulan.

Sejumlah peneliti memprediksi, komet ini hanya akan mencapai magnitudo tampak 8.

Artinya, pengamatan membutuhkan teleskop atau alat bantu optik. Namun, peneliti lain memperkirakan kecerahannya bisa mencapai magnitudo 2,5. Jika prediksi ini terbukti, komet tersebut dapat terlihat dengan mata telanjang.

Magnitudo tampak diukur dengan skala logaritmik terbalik. Semakin kecil angkanya, semakin terang objek tersebut.

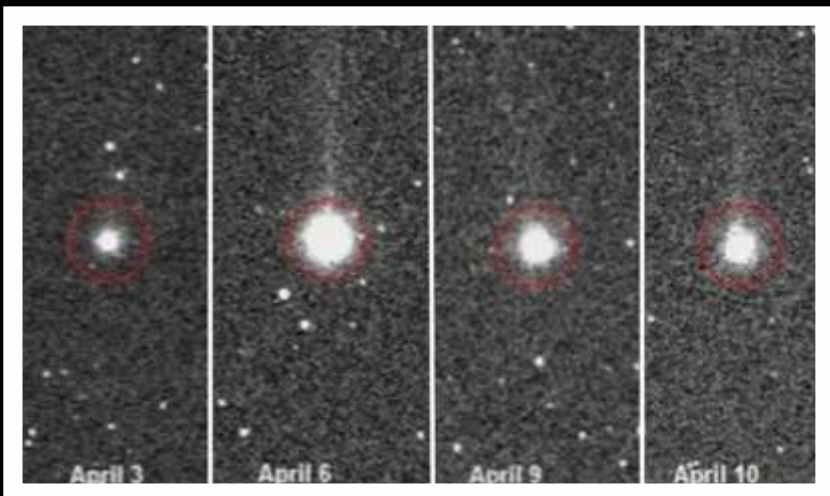
Menurut para astronom, waktu terbaik untuk mengamati komet ini diperkirakan terjadi menjelang perihelion. Periode tersebut jatuh sekitar 17 April, bertepatan dengan

fase Bulan baru, sehingga langit malam akan tampak lebih gelap dan minim gangguan cahaya. Kondisi ini dinilai ideal untuk membantu pengamatan objek langit yang cahayanya relatif redup seperti komet.

Meski demikian, saat komet berada pada jarak terdekat dengan Bumi, posisinya diperkirakan cukup berdekatan dengan Matahari.

Situasi ini berpotensi menyulitkan proses pengamatan, terutama bagi pengamat di belahan selatan Bumi karena cahaya Matahari dapat menutupi keberadaan komet.

Para astronom memperkirakan komet tersebut akan kembali dapat diamati dengan lebih jelas pada awal Mei, ketika posisinya menjauh dari Matahari dan terlihat lebih tinggi di langit malam. (Ella - UINSA, berkontribusi dalam penulisan)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** GATOT SUNARKO I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **TRENGGALEK:** TINA W I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Rahasia Makeup Bibir Tampak Penuh Tanpa Bantuan Filter

Tren riasan terus berkembang seiring kreativitas para makeup artist yang kini mampu menciptakan ilusi visual hanya melalui pemilihan warna kosmetik dan teknik aplikasi yang tepat.

Salah satu teknik yang tengah menjadi sorotan adalah double lip line, sebuah metode riasan bibir yang diklaim mampu memberikan efek bibir lebih penuh, simetris, dan natural tanpa bantuan filter digital maupun prosedur estetika.

Teknik double lip line dilakukan dengan memanfaatkan produk bibir untuk menciptakan dua garis berbeda di area bibir, sehingga menghasilkan dimensi yang lebih nyata. Cara ini dinilai efektif untuk mempertegas bentuk bibir sekaligus menciptakan kesan volume yang halus dan realistis.

Rekomendasi Lip Liner Terbaik untuk Pemula

Luxcrime Ultra Smooth Lip Liner:

Dikenal memiliki formula ultra-smooth yang sangat empuk, memudahkan pemula dalam membuat garis bibir yang rapi tanpa perlu menekan keras.

BLP Beauty Lip Liner:

Produk lokal ini menghasilkan warna yang pigmented dan matte, cocok untuk memberikan definisi dan menjaga bentuk bibir.

Madame Gie About Pout Lip Liner:

Pilihan sangat terjangkau (affordable) dengan desain ultra-precise yang memudahkan pembentukan bibir, ideal bagi pemula.

Make Over Lip Amplify Contour Liner:

Memiliki tekstur lembut dan warna yang intens untuk memberikan dimensi bibir yang lebih tebal.

Inez Color Contour Plus Lip Liner:

Produk lokal yang mudah diaplikasikan dengan hasil natural. (*)

Profesional hair dan makeup artist, Kate Johnson, menyebutkan bahwa teknik tersebut dapat memberikan hasil signifikan apabila diaplikasikan secara presisi. "Garis bibir ganda dapat membuat bibir kamu terlihat lebih penuh jika riasan dilakukan dengan benar.

Namun, jika keliru, hasilnya justru bisa terlihat seperti menggambar bibir terlalu tebal," ujarnya. Karena itu, ketepatan teknik menjadi faktor utama agar tampilan akhir tetap terlihat alami.

Johnson menjelaskan bahwa double lip line merujuk pada kondisi ketika terdapat dua garis di sekitar bibir. Garis kedua yang tampak lebih terang biasanya muncul di luar warna alami bibir dan dikenal sebagai vermilion line.

Sebagian orang memang memiliki garis ini secara alami, namun bagi yang tidak, efek serupa dapat diciptakan melalui teknik riasan tertentu. Tujuannya adalah menambah dimensi visual sehingga bibir terlihat lebih tebal dan menonjol.

Perbedaan antara double lip line dan garis bibir konvensional turut dijelaskan oleh penata rias sekaligus kreator konten kecantikan, Sarah Khursigara. Menurutnya, teknik double lip line menghasilkan efek bibir penuh yang lebih natural dibandingkan metode overdraw yang kerap membuat bibir tampak berlebihan.

Dalam salah satu tutorialnya, Khursigara memperlihatkan perbandingan antara aplikasi lipstick yang mengikuti satu garis bibir dengan riasan yang memanfaatkan dua garis berbeda. Ia menekankan bahwa penempatan produk yang tepat dapat

menciptakan ilusi bibir lebih berisi, khususnya dengan menarik sudut bibir ke arah dalam dan menonjolkan bagian tengah.

Hasilnya, riasan terlihat lembut dan menyatu dengan bentuk alami bibir, bukan sekadar lipstick yang diaplikasikan melewati garis asli.

Johnson menambahkan bahwa teknik double lip line sangat membantu bagi mereka yang memiliki bentuk bibir tidak simetris. Perbedaan ukuran antara bibir atas dan bawah dapat disiasati melalui teknik ini sehingga tampilan bibir terlihat lebih seimbang.

"Teknik ini bukan hanya menambah volume, tetapi juga membantu menciptakan proporsi bibir yang lebih harmonis," jelasnya.

Bagi mereka yang secara alami telah memiliki double lip line, Johnson menyarankan penggunaan teknik riasan sebagai penunjang untuk menonjolkan efek tersebut secara halus dan tidak berlebihan. Langkah awal dimulai dengan melembutkan garis luar bibir menggunakan bedak transparan atau sedikit concealer agar garis terlihat lebih rapi, bersih, dan menyatu

dengan warna kulit di sekitarnya. Tahap berikutnya difokuskan pada garis bagian dalam bibir dengan menggunakan lip liner untuk menarik bentuk bibir ke arah tengah, sehingga memberikan ilusi dimensi yang lebih tegas.

Pada tahap akhir, lip liner diaplikasikan pada garis luar hanya di bagian tengah bibir, lalu dibaurkan perlahan ke sisi kanan dan kiri agar hasilnya tampak lembut dan tidak kaku.

Menurut Johnson, kombinasi antara penegasan garis dalam di bagian samping dan garis luar di bagian tengah secara otomatis menciptakan efek bibir yang tampak lebih cembung dan berisi.

Sebagai sentuhan akhir, lipstick atau lip gloss diaplikasikan sedikit lebih tebal di area tengah bibir untuk memperkuat kesan penuh yang lebih menonjol.

Dengan pemilihan warna yang tepat, teknik pembauran yang lembut, serta penempatan produk yang presisi, riasan bibir dapat terlihat lebih natural, seimbang, dan tetap menarik perhatian tanpa terkesan berlebihan. (Ella-UINSA, berkontribusi dalam penulisan ini).



Ahok Tantang Usut ...dari hal 1

Mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, secara terbuka mendorong jaksa penuntut umum untuk memeriksa mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di tubuh Pertamina.

Dorongan itu disampaikan Ahok saat memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan perkara tersebut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2026).

Ahok hadir sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan minyak mentah Pertamina periode 2018–2023. Dalam persidangan, ia menyoroiti pencopotan dua direksi anak usaha Pertamina yang menurutnya memiliki integritas dan kinerja baik, namun justru diberhentikan tanpa dasar meritokrasi yang jelas.

Dua nama yang dimaksud adalah Joko Priyono, mantan Direktur Utama PT Kilang Pertamina Internasional (KPI), serta Mas'ud Khamid, mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN).

Keduanya disebut Ahok sebagai figur penting dalam upaya pembenahan sektor kilang dan distribusi BBM di Pertamina.

Isu pencopotan dua direksi itu mencuat ketika jaksa penuntut umum mengonfirmasi keterangan Ahok dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Jaksa mempertanyakan apakah ada persoalan tertentu yang menyebabkan kedua pejabat tersebut dicopot dari jabatannya.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ahok justru menyampaikan penilaian positif. Ia menegaskan bahwa Joko Priyono dan Mas'ud Khamid merupakan dua direktur terbaik yang pernah dimiliki Pertamina.

"Bagi saya dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya, untuk memperbaiki produksi kilang termasuk Patra Niaga. Semua yang saya arahkan mereka kerjakan," ujar Ahok di hadapan majelis hakim.

Ahok bahkan mengungkap sikap Mas'ud Khamid yang menurutnya mencerminkan integritas tinggi. Ia menyebut Mas'ud memilih diberhentikan daripada harus menandatangani pengadaan yang dinilai menyimpang.

"Termasuk soal aditif ini, Pak Mas'ud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini salah satu terbaik yang kita punya," ungkapnya.

Sementara itu, Joko Priyono disebut Ahok sebagai sosok teknokrat tulen yang memahami persoalan kilang secara mendalam. Latar belakang teknis Joko dinilai menjadi

kunci dalam mengidentifikasi kelemahan kilang dan rencana perbaikannya.

"Pak Joko ini orang kilang, asli dari kilang. Pengetahuannya paling bagus soal kilang. Dia yang kasih tahu saya kelemahan kilang, apa yang mau diperbaiki. Ketika dia dicopot, saya sampai mau nangis," tutur Ahok.

Ia mengaku sempat menelepon Joko Priyono setelah pencopotan tersebut. Dari percakapan itu, Ahok semakin yakin bahwa keputusan pencopotan tidak didasarkan pada kinerja maupun merit.

"Dia bilang, 'Pak, sudahlah Pak, saya di Yogya saja.' Saya pikir BUMN ini keterlaluan, mencopot orang yang bukan karena meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan hal yang benar justru dicopot? Ini orang terbaik, makanya saya tulis dicopot dalam BAP," tegas Ahok.

Atas dasar itu, Ahok menyatakan keheranannya terhadap proses pengambilan keputusan di level Kementerian BUMN. Ia pun mendorong jaksa untuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam perombakan direksi, termasuk Erick Thohir sebagai Menteri BUMN saat itu hingga

Presiden Joko Widodo.

"Makanya saya selalu bilang ke pak jaksa, kenapa saya mau lapor ke jaksa? Periksa sekalian BUMN, periksa Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot?" cetus Ahok.

Pernyataan tersebut sempat memicu tepuk tangan dari pengunjung sidang. Namun, majelis hakim langsung memberikan teguran agar suasana persidangan tetap tertib.

"Tolong pengunjung bisa tertib. Ini persidangan, bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk tangan," tegas hakim.

Menanggapi dorongan Ahok agar Erick Thohir dan Jokowi diperiksa, jaksa penuntut umum menyatakan bahwa keterangan tersebut tidak berkaitan langsung dengan penggalan pengetahuan Ahok sebagai saksi dalam perkara yang sedang disidangkan.

"Itu kan fakta dari keterangan saksi. Namun saksi sendiri tidak menjelaskan fakta yang mana, detail perbuatan seperti apa, itu tidak pernah dikemukakan di persidangan. Tidak ada dokumen atau keterangan dari Pak Ahok yang bisa memastikan fakta tersebut," ujar jaksa.

Dalam perkara ini, Ahok

dihadirkan sebagai saksi untuk sejumlah terdakwa, termasuk pihak-pihak yang terkait dengan dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina yang disebut merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Ahok menyatakan tidak mengenal buronan Riza Chalid. Ia bahkan mempertanyakan anggapan bahwa Riza Chalid memiliki kekuatan besar hingga disebut mampu melakukan intervensi di lingkungan Pertamina.

Dalam persidangan, anak Riza Chalid, Muhammad Kerry Adrianto Riza, menanyakan apakah Ahok pernah menerima laporan terkait dugaan paksaan sewa Terminal BBM Merak milik keluarganya oleh Riza Chalid.

"Pernah nggak, Pak, ada laporan kepada Pak Ahok bahwa Muhammad Riza Chalid itu memaksa sewa terminal BBM Merak milik saya?" tanya Kerry.

Ahok menegaskan tidak pernah menerima laporan tersebut dan mengaku sama sekali tidak mengenal Riza Chalid. "Tidak pernah, kenal juga nggak," jawab Ahok. (wid,ktn,ust,tmo/dya)

Tegaskan Tak Ada BBM Oplosan di Pertamina

MANTAN Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, menegaskan bahwa tidak pernah terjadi pencampuran bahan bakar minyak (BBM) secara ilegal di lingkungan Pertamina. Menurut Ahok, proses pencampuran yang dilakukan merupakan blending BBM yang sah dan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Penegasan tersebut disampaikan Ahok saat menghadiri sidang perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (27/1/2026). Sidang sempat diskors sebelum Ahok memberikan keterangan kepada awak media.

"Kan terbukti nggak ada oplosan kan, (adanya) blending kan," kata Ahok kepada wartawan.

Ahok menjelaskan, blending merupakan proses teknis yang lazim dilakukan dalam industri migas dan tidak dapat disamakan dengan praktik pengoplosan BBM ilegal. Proses tersebut, kata dia, dilakukan sesuai aturan dan tidak melanggar hukum.

Selain membantah isu BBM oplosan, Ahok juga mengaku tidak memahami dasar perhitungan kerugian negara yang disebut mencapai Rp 285 triliun dalam perkara tersebut. Ia menyatakan tidak mengetahui metode yang

digunakan jaksa dalam menghitung nilai kerugian negara.

"Saya juga enggak tahu hitungannya gimana," ujar Ahok singkat.

Dalam perkara ini, Ahok dihadirkan sebagai saksi oleh jaksa penuntut umum untuk sembilan terdakwa yang diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina. Para terdakwa berasal dari jajaran direksi dan pejabat sejumlah anak usaha Pertamina, serta pihak swasta yang terkait dengan pengelolaan terminal dan distribusi BBM.

Tak Ada Laporan Soal Sewa Terminal BBM

Dalam kesaksiannya di persidangan, Ahok juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menerima laporan terkait permasalahan penyewaan terminal BBM milik PT Orbit Terminal Merak (OTM) oleh Pertamina. Saat menjabat sebagai Ketua Komite Audit Pertamina, Ahok mengaku tidak pernah mendapatkan laporan adanya indikasi kemahalan harga sewa terminal tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ahok saat menjawab pertanyaan jaksa mengenai apakah dirinya pernah memperoleh informasi atau laporan dari direksi, baik di tingkat holding maupun subholding, terkait

penyewaan terminal BBM pada 2014.

"2014 saya masih jauh belum masuk ke dalamnya," jawab Ahok di hadapan majelis hakim.

Jaksa kemudian menegaskan bahwa periode sewa terminal tersebut berlangsung hingga 2024. Menanggapi hal itu, Ahok menjelaskan bahwa Dewan Komisaris tidak terlibat langsung dalam urusan operasional jangka panjang, kecuali apabila terdapat temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Nah, ini tidak ada (laporan) selama saya masuk, saya ketua Komite Audit, ada teman saya itu, tidak pernah menerima laporan adanya temuan kemahalan seperti ini," tutur Ahok.

Meski demikian, Ahok menduga penyewaan terminal BBM dilakukan karena pada periode tersebut sejumlah jetty atau fasilitas dermaga milik Pertamina mengalami kerusakan. Kondisi itu menyebabkan kapal-kapal berukuran besar tidak dapat bersandar, sehingga Pertamina membutuhkan alternatif fasilitas penyimpanan dan distribusi BBM.

"Saya enggak tahu apa karena itu, tetapi yang pasti 2014 saya belum masuk dan tidak ada temuan di Komite Audit waktu saya masuk," kata Ahok menegaskan. (wid,rls,mer/dya)

Pejabat Bea Cukai Disapu Dulu, Pajak Menyusul Pekan Depan

MENKEU PURBAYA: TERGANTUNG DOA MEREKA

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali bangkit pada perdagangan Senin (26/1/2026), setelah dalam beberapa hari sebelumnya nyaris menembus level psikologis Rp17.000 per dolar AS. Penguatan ini dipengaruhi kombinasi sentimen global dan domestik, mulai dari pelemahan data ekonomi AS, langkah stabilisasi Bank Indonesia (BI), hingga terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputy Gubernur BI.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah ditutup menguat 0,23 persen ke posisi Rp16.782 per dolar AS. Sejalan dengan itu, indeks dolar AS tercatat melemah 0,40 persen ke level 97,21. Sejumlah mata uang Asia lainnya juga menunjukkan kinerja positif pada perdagangan hari ini.

Pengamat Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai penguatan rupiah tak lepas dari rilis data ekonomi AS yang berada di bawah ekspektasi pasar. Kondisi tersebut menekan permintaan terhadap dolar AS dan membuka ruang penguatan bagi mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

"Dengan data AS yang kurang baik, permintaan dolar cenderung berkurang. Ini menjadi sentimen positif bagi rupiah," ujar Nailul, Senin (26/1/2026).

Dari sisi domestik, Nailul menyoroti posisi cadangan devisa Indonesia yang masih kuat. Hal itu memberikan keyakinan kepada pasar bahwa Bank Indonesia memiliki ruang yang cukup untuk melakukan



Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Indonesia Fiscal Forum (IFF) 2026 di Jakarta, Selasa (27/1/2026).ist

intervensi di pasar valuta asing guna menjaga stabilitas nilai tukar.

Ia menyebut cadangan devisa terlihat dikuras untuk intervensi, yang menunjukkan keseriusan BI dalam menjaga stabilitas rupiah. "Selain faktor fundamental, waktu penguatan rupiah juga dinilai bertepatan dengan terpilihnya Deputy Gubernur BI, Thomas Djiwandono. Momentum ini

turut membentuk sentimen positif di pasar. Isu ini bisa saja dimanfaatkan pasar untuk menggoreng sentimen," katanya.

Senada, Direktur Utama OCBK Sekuritas Betty Goenawan menyampaikan harapan agar informasi dan kebijakan positif dari pemerintah dapat berlanjut sehingga menopang penguatan rupiah secara

berkelanjutan.

"Kalau untuk hari ini, kami harapkan beberapa informasi positif dari yang dikeluarkan pemerintah, seperti cadangan devisa dan pemilihan Deputy Gubernur BI, bisa terus mendukung penguatan rupiah," ujar Betty.

Dari sisi fundamental domestik, Betty menilai kondisi ekonomi nasional masih relatif solid. Hal itu tercermin dari Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers' Index/PMI) manufaktur Indonesia yang tetap berada di zona ekspansif, menandakan aktivitas produksi yang masih terjaga.

"Secara ekonomi sebenarnya masih bagus. PMI manufaktur masih positif, jadi dari sisi produksi kita masih kuat. Pelemahan rupiah sebelumnya lebih dipengaruhi faktor lain," jelasnya. (tin,ktn,blo/dya)

5 PELABUHAN YANG PEJABAT BEA CUKAINYA BAKAL DIEVALUASI

TANJUNG PRIOK (JAKARTA UTARA)

- Status: Pelabuhan tersibuk dan terancang di Indonesia.
- Peran: Hub utama perdagangan internasional dan gerbang ekonomi nasional.
- Fokus: Menangani lebih dari 50% lalu lintas peti kemas Indonesia.

TANJUNG PERAK (SURABAYA)

- Status: Pelabuhan terbesar kedua di Indonesia.
- Peran: Pusat kolektor dan distributor barang untuk wilayah Indonesia Timur.
- Fokus: Konektivitas logistik menuju Sulawesi, Kalimantan, Maluku, dan Papua.

TANJUNG EMAS (SEMARANG)

- Status: Gerbang maritim utama Jawa Tengah.
- Peran: Pendukung ekspor komoditas industri (tekstil, furnitur) dan pariwisata kapal pesiar.
- Fokus: Pengembangan kawasan industri terintegrasi di pesisir Jawa Tengah.

PELABUHAN BATAM (KEPULAUAN RIAU)

- Status: Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) strategis.
- Peran: Jalur transit internasional yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Selat Malaka.
- Fokus: Logistik industri manufaktur, galangan kapal, dan alih muat kapal (transshipment).

PELABUHAN BELAWAN (MEDAN, SUMATERA UTARA)

- Status: Pelabuhan tersibuk di Pulau Sumatera.
- Peran: Gerbang ekspor unggulan perkebunan seperti kelapa sawit (CPO) dan karet.
- Fokus: Melayani jalur perdagangan menuju Selat Malaka dan pasar internasional ke arah Barat.



meningkatkan integritas aparatur.

Menurut Purbaya, peningkatan penerimaan negara tidak ditempuh dengan menaikkan tarif pajak, melainkan dengan menindak tegas perusahaan yang sengaja menghindari kewajiban perpajakan, seperti praktik penjualan tunai langsung ke konsumen untuk menekan PPN dan PPh.

"Praktik seperti itu seharusnya tidak lolos. Dengan penataan ulang pegawai dan sistem pengawasan, ke depan celah itu harus ditutup," tegas Purbaya. (wid,ist,kcm/dya)

Lawan Pembeking, Menko Polkam Digandeng

Pemerintah mengubah strategi dalam mengejar penerimaan negara dengan menitikberatkan pada penindakan praktik ekonomi ilegal yang selama ini dinilai menjadi akar persoalan kebocoran pajak. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai, rendahnya penerimaan negara bukan semata disebabkan oleh tarif atau lemahnya kepatuhan administrasi, melainkan kuatnya praktik ilegal di lapangan yang kerap dilindungi oleh beking.

Untuk memutus mata rantai tersebut, Purbaya menggandeng Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamar Chaniago guna memperkuat penegakan hukum lintas sektor.

"Kami sepakat untuk bekerja sama. Selama ini kalau turun ke lapangan, selalu ada cerita soal beking. Itu yang ingin kita hadapi bersama," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Melalui kolaborasi ini, Kemenko Polkam akan mengerahkan unsur kepolisian, TNI, serta aparat keamanan lainnya untuk mendampingi petugas pajak dan bea cukai dalam menjalankan tugas pemeriksaan dan penindakan. Dukungan tersebut bertujuan memastikan tidak ada lagi intervensi maupun perlindungan terhadap aktivitas ekonomi ilegal yang merugikan keuangan negara.

Sebagai langkah awal, pemerintah akan memfokuskan penindakan pada peredaran rokok ilegal yang selama ini dinilai menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan terbesar. Purbaya menyebut sektor ini memiliki jaringan distribusi luas dan kerap beroperasi di luar pengawasan resmi.

"Fokus pertama kita rokok ilegal. Dengan dukungan aparat, kita ingin pastikan tidak ada lagi yang berani melindungi praktik-praktik seperti itu. Targetnya dalam satu bulan ke depan sudah mulai berjalan," jelas Purbaya.

Di luar aspek penegakan hukum, Purbaya menegaskan pemerintah tetap mendorong pembenahan struktural di sektor fiskal. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelarasan kebijakan fiskal dan moneter, penguatan iklim usaha, serta penciptaan aktivitas ekonomi yang lebih sehat dan transparan.

Kementerian Keuangan juga terus membenahi sistem administrasi perpajakan, termasuk penyempurnaan Coretax untuk menutup celah yang berpotensi dimanfaatkan wajib pajak tidak patuh. Selain itu, teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) mulai diterapkan untuk mendeteksi praktik under-invoicing dan manipulasi laporan keuangan.

Langkah internal turut menjadi perhatian. Purbaya memastikan akan melakukan restrukturisasi besar-besaran di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai guna memperkuat pengawasan serta